

Judul : Komisi I pertanyakan anggaran pengadaan alutsista
Tanggal : Selasa, 06 September 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Komisi I Pertanyakan Anggaran Pengadaan Alutsista

Pembelian alutsista harus berdasarkan kebutuhan, permintaan, atau bersifat pemberian.

SRI UTAMI
ami@mediaindonesia.com

ANGGOTA Komisi I DPR TB Hasanuddin mengkritisi rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membeli alutsista senilai US\$55 miliar.

"Kami mendapatkan informasi akan ada pengadaan (alutsista) dan lain sebagainya termasuk juga freight dari Jepang dengan nilai sekitar

US\$55 miliar atau ratusan triliun. Pak Wamen jangan senyum-senyum nih. Itu katanya sedang dikonsepsi untuk dikeluarkan perpres," ucap TB Hasanuddin saat rapat kerja DPR bersama Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, kemarin.

Menurutnya, pembelian alutsista harus berdasarkan kebutuhan, permintaan, atau bersifat pemberian. "Apakah jumlah dari alutsista ini memang hasil usulan dari bawah atau memang pemberian. Supaya ada manfaatnya ketika kita mengeluarkan uang ini andaikan perpres itu turun," ujarnya.

Hasanuddin juga mempertanyakan anggaran Kemenhan 2023 senilai Rp131 triliun. Sebesar Rp22 triliun untuk Kemenhan, Mabes TNI

Rp11 triliun, TNI-AD Rp55 triliun, TNI-AL Rp23 triliun, dan TNI-AU Rp19 triliun. "Berdasarkan pengalaman saya dalam menentukan jumlah ini sering terjadi tarik-ulur, bahkan dulu terjadi semacam ketegangan. Apakah angka-angka ini sudah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dengan mendengarkan aspirasi dari setiap user dan apakah pembelanjaan ini sudah sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai ada istilah yang diajukan tidak turun yang turun tidak pernah diajukan," tegasnya.

Herindra memaparkan Kemenhan memiliki sejumlah program prioritas yang bertujuan meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. "Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertum-

buhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing," ujarnya.

Tidak hadir

Dalam rapat itu, tidak tampak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Ketidakhadiran kedua sosok tersebut diprotes para anggota Komisi I.

Herindra menjelaskan ketidakhadiran Prabowo karena mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid

memaklumi alasan tersebut. Dia meminta agar Prabowo menghadiri rapat selanjutnya karena beragendakan pengambilan keputusan anggaran Kemenhan pada 2023.

Sementara itu, Dudung tidak hadir karena mengecek kesiapan operasi Satgas Yonif 143/TWJ Kodam Sriwijaya di Papua. "Kita lihat banyak hal yang menonjol yang dilakukan negatif oleh prajurit sehingga dengan keberadaan Bapak KSAD di tengah-tegah prajurit akan memberikan motivasi," kata Wakil KSAD Letnan Jenderal Muhammad Munir.

Mendengar alasan itu, sejumlah anggota Komisi I protes sebab banyak permasalahan yang akan dibahas dengan Dudung terkait dengan kinerja prajurit TNI-AD. "Apalagi dengan kejadian kasus mutilasi di Timika, kami sebenarnya butuh KSAD itu hadir di sini untuk menjelaskan," kata anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas.

Anggota Fraksi PKS Sukamta yang menyebutkan ketidaklengkapan jajaran TNI saat rapat sudah terjadi berulang kali. Padahal, DPR telah mengizinkan untuk kejadian serupa tidak boleh terulang. (Atm/P-5)